



13

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- ~~372~~ -2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna anggaran sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat yang Berwenang untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berhalangan maka Pengesahan Surat Pertanggungjawaban dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Spesimen paraf dan tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Diktum Ketiga sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dan 6 lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI


M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Badan Keuangan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Padang
5. Inspektur Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi
7. Arsip

SUSUNAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	SPESIMEN		KET
				PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. MELFI, M. Si NIP. 19660506 198602 1005 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
2	Dinas Kesehatan	drg. YANDRA FERRY. MM NIP. 19610118 199301 1001 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ir. OKTAVIANUS, MT NIP.196310301992021001 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Drs. NOFRIANTO, CH, MM NIP. 19620218 198203 1003 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
5	Dinas Kebakaran	MARTIUS, S, Sos NIP.196303281986031005 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Drs. SYAFNIR, M.M NIP. 196908161990031006 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	MUSMULYADI. SH NIP. 197404292003121004 GOL. IV/a	Kepala/Pengguna Anggaran			
8	Dinas Sosial	Dra. ELLIA MAKMUR, MM NIP. 196005071984032004 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TATI YASMARNI, SE,MM NIP. 19630629 198302 2001 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	SPESIMEN		KET
				PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7
10	Dinas Lingkungan Hidup	Drs. SUPADRIA M.Si NIP. 196210271984091002 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RIDWAN EFFENDI. SH NIP. 196106121981011003 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
12	Dinas Perhubungan	Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M,Si NIP. 196303021986031034 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Drs. NOVRI, M,Pd NIP.196111241991031004 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	MUHAMMAD IDRIS. S.Sos NIP. 196812311989031027 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	SYAHRIZAL, ST NIP. 19611212 198602 1002 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Drs. JOHNNI NIP. 196612101986021003 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Drs. ERWIN UMAR, M.Pd NIP. 196311301988031003 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
18	Dinas Pertanian dan Pangan	Ir. MELWIZARDI, M.Si NIP. 196610241993081001 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
19	Sekretariat Daerah	YUEN KARNOVA, SE, ME NIP. 196301111988031008 GOL. IV/d	Kepala/Pengguna Anggaran			
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Drs. HERMANSYAH. M.Si NIP. 196109241982101001 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	SPESIMEN		KET
				PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BAHARYADI, SH NIP. 195909291985031007 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
22	Badan Keuangan	HERRIMAN, SH.M.Hum NIP. 19680525 199308 1001 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SUSTINNA. SE NIP. 196601041986022003 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
24	Inspektorat	AMRI, SE NIP. 196203111986031004 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
25	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	EMIL ACHIR. S.Sos NIP. 196806181989031006 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
26	Kecamatan Guguk Panjang	Drs. RISPAYANTO NIP. 19610810 198611 1001 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Drs. HENDRY, ME NIP. 197309191993111002 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Drs. ALDIASNUR, M,Si NIP. 197208161993031003 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			

WALIKOTA BUKITTINGGI


M. RAMLAN NURMATIAS